

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI SUNGAI
JAMBU TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

**RIZKI RAHMADHANI
NIM/TM : 1101587/2011**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

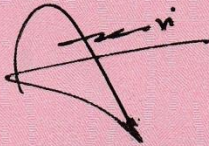
**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI SUNGAI JAMBU TANAH DATAR**

Nama : Rizki Rahmadhani
NIM : 1101587
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2015

Disetujui Oleh

Pembimbing I,



Dra. Jumiati, M. Si
NIP. 196211091986022001

Pembimbing II,

Dra. Heni Candra Gustina
NIP. 196308081987032003

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Judul : Implementasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sungai
Jambu Tanah Datar

Nama : Rizki Rahmadhani

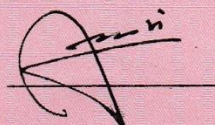
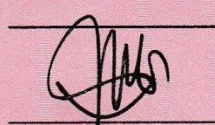
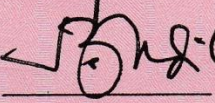
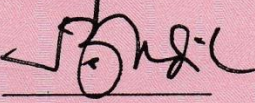
NIM : 1101587

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

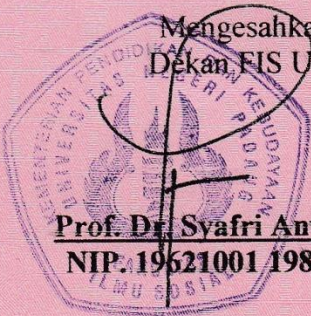
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2015

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Dra. Jumiati, M. Si	1. 
2. Sekretaris : Dra. Heni Candra Gustina	2. 
3. Anggota : Drs. Syamsir, M. Si, Ph. D	3. 
4. Anggota : Adil Mubarak, S. IP, M. Si	4. 

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP


Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Rahmadhani

Nim/Tahun Masuk : 1101587/2015

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul Skripsi : **Implementasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah

Datar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang maupun Program Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan *menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.*
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2015

Yang menyatakan,


RIZKI Rahmadhani

ABSTRAK

**RIZKI RAHMADHANI : (2011/1101587) IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
SUNGAI JAMBU TANAH DATAR**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Nagari Sungai Jambu seperti kurangnya masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan dan keterampilan. Kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat Nagari Sungai Jambu bisa dikatakan masuk dalam kategori kekurangan dari berbagai aspek kehidupan. Hal ini akan dapat diatasi apabila pelaksanaan program – program yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan *life skills* masyarakat dapat mengayomi, mengajak, memfasilitasi dengan program - program yang mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di Nagari Sungai Jambu. Dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Nagari Sungai Jambu Kabupaten Tanah Datar, dan didukung melalui program PKBM oleh Pemerintah, diharapkan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat Nagari Sungai Jambu dapat terjawab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di PKBM Marapi Nagari Sungai Jambu Kabupaten Tanah Datar. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data ini penulis kumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PKBM yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan *life skills* masyarakat secara umum belum berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PKBM Marapi, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu untuk meningkatkan dan mencapai hasil yang maksimal pihak PKBM Marapi melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ada dalam implementasi program PKBM dalam pemberdayaan masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahrabbi l a'lamiiin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Jumiati, M.Si sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagai masukan serta arahan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dra. Heni Candra Gustina sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagai masukan serta arahan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D, Bapak Zikri Alhadi S.IP. MA, Bapak Adil Mubarak S.IP, M. Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Ketua Jurusan dan Ibu Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staf administrasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
8. Bapak Wali Nagari Sungai Jambu dan Bapak Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Sungai Jambu selaku informan penelitian yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pegawai Kantor Wali Nagari Sungai Jambu yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

10. Pengurus, tutor/narasumber dan anggota PKBM Marapi yang telah bersedia menjadi informan penelitian dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Teristimewa ucapan terimakasih terdalam buat kedua orang tuaku Bapak H. Masril Maksun dan Ibu Hj. Yurni Mahmud serta kakak-kakak ku Toni Adrian A.Md, Aprianti Masril, SE dan Siska Sri Masyuni Amd. Keb yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, terimakasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca. Amin.

Padang, Agustus 2015

Rizki Rahmadhani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Konsep Implementasi.....	12
2. Implementasi Program	15
3. Aktor Implementasi.....	19
4. Kendala Dalam Implementasi Program	20
5. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Implementasi Program	23
6. Program PKBM	25
7. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	27
1) Pengertian PKBM	28
2) Karakteristik PKBM	30
3) Fungsi PKBM	31
4) Parameter PKBM	33
8. Pemberdayaan Masyarakat.....	35
1) Definisi Pemberdayaan Masyarakat.....	35
2) Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	37

3) Indikator Pemberdayaan Masyarakat	38
9. Peningkatan <i>Life Skills</i> Masyarakat	40
1) Pengertian <i>Life Skills</i>	40
2) Ciri-Ciri Pembelajaran Pendidikan <i>Life Skills</i>	43
3) Prinsip Umum Pendidikan <i>Life Skills</i>	44
4) Tujuan Pendidikan <i>Life Skills</i>	45
B. Kerangka Konseptual	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Informan Penelitian	50
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	52
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data	55
F. Teknik Analisis Data	57

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	61
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
2. Profil Pelaksanaan Program PKBM Marapi	67
3. Gambaran Umum Pelaksanaan Program PKBM Marapi	72
B. Temuan Khusus	
1. Implementasi Program PKBM Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar	76
2. Kendala Implementasi Program PKBM Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar.....	86
3. Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Program PKBM Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar ...	101
C. Pembahasan.....	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Sara	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Informan Penelitian.....	51
4.1 Luas Jorong Nagari Sungai Jambu.....	61
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
4.4 Sentra Produksi Komoditi Padi dan Palawija.....	66
4.5 Produksi Komoditi Sayuran.....	66

DAFTAR GAMBAR

2.2 Kerangka Konseptual.....	47
4.1 Struktur Organisasi PKBM Marapi.....	70
4.2 Kegiatan Praktek Pengolahan Pangan Lokal.....	81
4.3 Spanduk Sosialisasi PKBM Marapi.....	95
4.4 Suasana Kegiatan Pembelajaran PKBM Marapi.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian.....	133
2. Dokumentasi Penelitian	139
3. Surat Tugas Pembimbing Skripsi.....	140
4. Surat Izin Penelitian.....	141
5. Surat Rekomendasi Penelitian.....	142
6. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, dimana tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dengan melihat perkembangan zaman pada era global ini, dapat ditemui adanya ketidakmerataan yang terwujud dalam hubungan sosial dan antar kelompok masyarakat. Dalam situasi ini, terdapat kelompok masyarakat yang kuat dan mapan, sementara kelompok lain berada dalam situasi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dari berbagai aspek kehidupan.

Fenomena ini mendiskripsikan bahwa secara umum salah satu penyebab terjadinya kesenjangan dalam masyarakat berasal dari aspek pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan di masa sekarang ini merupakan kebutuhan yang amat penting. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Kebutuhan dasar ini seharusnya terpenuhi dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Pembangunan sektor pendidikan merupakan bagian integral dalam sistem pembangunan nasional. Sebagai salah satu agenda pendidikan nasional, pemerintah telah berupaya menciptakan pemerataan dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Pemberian kesempatan dan pemerataan pendidikan inilah yang dijadikan barometer percepatan pembangunan di daerah. Landasan pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan menjadi hal terpenting dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Pendidikan merupakan kewajiban yang harus diemban negara yang ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan yang merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara merupakan salah satu aspek dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Apabila masyarakat telah mempunyai pendidikan dan mampu menguasainya, maka secara langsung akan berpengaruh kepada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Eddy Ch. Papilaya dalam Zubaedi (2013: 24) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Selain itu, menurut Payne dalam Rukminto (2012: 205-206), pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Pemberdayaan masyarakat salah satunya bertujuan untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata, sehingga mampu meningkatkan kemampuan bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang sosial masyarakat. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar masyarakat

yang berada di bawah garis kemiskinan dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil, sedangkan dalam bidang pendidikan agar masyarakat dapat menggali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi masalah dan tantangan kehidupan yang dia hadapi, sedangkan tujuan pemberdayaan pada bidang sosial agar masyarakat dapat menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan peran dan tugasnya. (Rukminto, 2012: 207).

Salah satu sektor yang dapat diberdayakan sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan *life skills* masyarakat yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Menurut Depdiknas (2006), PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang diprakarsai, dibentuk dan dikelola oleh masyarakat untuk membelajarkan dan memberdayakan masyarakat sesuai kebutuhan belajar masyarakat setempat. PKBM jg merupakan media mempertemukan strategi pembangunan dari pemerintah (*top down planning*) dengan kebutuhan dan permasalahan rakyat (*bottom up planning*).

Sebagai wadah tempat pembelajaran, PKBM merupakan satuan pendidikan nonformal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 26 ayat 4 yang menyatakan, bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diatur bahwa penyelenggaraan

pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal (pasal 100 ayat 1).

PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal dapat menyelenggarakan program pendidikan non formal yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat (Pasal 105 ayat 2).

Dengan melihat kondisi masyarakat di Jorong Labuatan, Nagari Sungai Jambu yang masih buta aksara dan tidak mendapatkan layanan akses pendidikan dan keterampilan, maka didirikanlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Marapi sebagai salah satu bentuk pendidikan nonformal.

Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Marapi merupakan suatu wadah dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skills*) serta mengembangkan minat, bakat dan karakter masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan nonformal (Pedoman Penyelenggaraan PKBM Marapi. 2012).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Marapi di Jorong Labuatan Nagari Sungai Jambu berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan PKBM Marapi. 2012 yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skills*) masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Dalam rangka pemberantasan buta aksara dan ragam keaksaraan, peningkatan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), peningkatan kemampuan dan keterampilan berwirausaha melalui budaya wirausaha.
3. Mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja atau mata pencaharian baru dengan menghasilkan dan memasarkan produk keterampilan yang didapat melalui PKBM termasuk akses kepada pasar.
4. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, mandiri dan berkarakter, serta dapat membentuk pola pikir masyarakat.

Selain itu, PKBM juga merupakan sarana untuk mengintensifkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat, sehingga dapat berjalan secara sinergis dan efektif untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan *life skills* masyarakat di PKBM Marapi diselenggarakan dengan mengacu pada kebutuhan dan minat masyarakat. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Akta Notaris Pendirian PKBM Marapi No. 01 Tahun 2012, dalam BAB III Pasal 7 Lingkup Kegiatan PKBM Marapi yaitu:

- a) Kegiatan pembelajaran ;
- b) Kegiatan usaha/ekonomi produktif (bisnis) ;
- c) Kegiatan pengembangan masyarakat.

Dari kegiatan PKBM Marapi diatas, hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skills*), meningkatnya pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) dan kewirausahaan, mampu menganekaragamkan menu masakan di rumah/keluarga, dan mampu mandiri dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga.

Namun, apa yang diharapkan dari program PKBM Marapi ini dalam implementasi (pelaksanaannya) masih belum terealisasi dengan baik. Berdasarkan wawancara awal penulis dengan Ketua PKBM Marapi Jorong Labuatan Nagari Sungai Jambu yaitu Ibu Ernalita diketahui bahwa implementasi PKBM Marapi masih menemui berbagai kendala dan permasalahan, yang disebabkan oleh berbagai faktor; *Pertama*, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan PKBM dalam artian program PKBM ini dari pemerintah untuk masyarakat tetapi modal dan bantuan dari pemerintah sulit untuk didapat, sehingga penyelenggaraan kegiatan PKBM tidak berjalan dengan lancar ; *Kedua*, pemikiran masyarakat yang tidak mendukung, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan PKBM, terlalu susah membentuk pola masyarakat dari “tahu” menjadi “mau”; *Ketiga*, terdapat kendala lain pada faktor keterbatasan akses pasar bagi masyarakat untuk memasarkan produk dari keterampilan yang didapat melalui PKBM.

Permasalahan pelaksanaan program PKBM Marapi di Jorong Labuatan Nagari Sungai Jambu juga dijelaskan oleh Sekretaris PKBM Marapi yaitu Ibu Meilendra, yang mengatakan:

“Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pengurus PKBM dalam peningkatan dan perkembangan PKBM untuk memberi manfaat kepada masyarakat, namun hasil yang didapat dan diperoleh belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan, keterampilan yang didapat masyarakat melalui PKBM belum bisa dipasarkan dengan baik, hal ini disebabkan karena kurangnya kemauan dalam diri masyarakat dan tidak adanya motivasi dalam diri masyarakat untuk maju, hanya beberapa orang saja yang aktif mengikuti kegiatan PKBM. Selain itu, masyarakat sangat terkendala dengan modal yang tersedia, masyarakat disarankan untuk meminjam kepada koperasi yang ada di nagari demi kelancaran usaha pengolahan pangan lokal , namun masyarakat menolak karena masyarakat selalu berharap bantuan yang diberikan oleh pemerintah, padahal bantuan dan modal dari pemerintah itu yang susah didapat”.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh implementasi program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “ Implementasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar”.

B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya perhatian pemerintah dalam bentuk modal maupun dalam bentuk bantuan terhadap pelaksanaan program PKBM.
- b. Keterbatasan modal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dari keterampilan yang didapat melalui program PKBM.
- c. Pemikiran dan partisipasi masyarakat yang tidak mendukung, dikarenakan belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk merubah pola dari “tahu” menjadi “mau”.
- d. Terbatasnya akses pasar bagi masyarakat untuk memasarkan produk dari keterampilan yang didapat melalui PKBM.

2. Batasan Masalah

Program PKBM memiliki 3 (tiga) bidang kegiatan, yaitu: Kegiatan Pembelajaran, Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (Bisnis), Kegiatan Pengembangan Masyarakat. Batasan dalam masalah penelitian ini adalah melihat bagaimana Implementasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar, di bidang Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (Bisnis) (Studi PKBM Marapi Jorong Labuatan Nagari Sungai Jambu Kabupaten Tanah Datar).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi program PKBM dalam pemberdayaan masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar?

2. Kendala apa yang ditemui dalam implementasi program PKBM dalam pemberdayaan masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi program PKBM dalam pemberdayaan masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar?

C. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan, keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan dan untuk mempertajam objek pembahasan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program PKBM dalam pemberdayaan masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam implementasi program PKBM dalam pemberdayaan Nagari Sungai Jambu Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi program PKBM dalam pemberdayaan masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai implementasi program PKBM dalam pemberdayaan untuk meningkatkan *life skills* masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:
 - a. Bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam membuat karangan ilmiah.
 - b. Sebagai perbandingan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang dan segala pemanfaatan dari tulisan ini.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada tema yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPUAL

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme dalam implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2007:145-146) berpendapat bahwa implementasi adalah

“Apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran nyata. Menurut Ripley dan Franklin, implementasi mencakup banyak kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan mentah, serta uang. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan konkret, regulasi serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan

menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja”.

Menurut Nudin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2002: 70)”.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. (Setiawan, 2004: 39).

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat

aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. (Harsono, 2002: 67)”.

Selain itu, konsep implementasi juga dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Solichin Abdul Wahab (2012: 135) yang menyatakan bahwa “implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier dalam Solichin Abdul Wahab (2012: 135-136) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa,

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni adanya penyesuaian-penyesuaian disana sini, terhadap tujuan dan strategi yang dilakukan oleh para aktor selama proses implementasi berlangsung”.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan upaya untuk melaksanakan keputusan yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan atau dampak yang diinginkan.

2. Implementasi Program

a. Bentuk Implementasi Program

Dalam studi implementasi terdapat bentuk implementasi program, yakni apakah suatu program dibuat oleh pusat dan diimplementasikan oleh daerah (*top-down*) atau program tersebut dibuat dengan melibatkan aspirasi dari bawah termasuk yang akan menjadi para pelaksananya (*bottom-up*). Persoalan ini hanya merupakan bagian dari bagaimana mengidentifikasi gambaran-gambaran dari suatu proses yang sangat kompleks, dari berbagai ruang dan waktu, serta beragam aktor yang terlibat di dalamnya.

Pelaksanaan suatu program dapat dilihat dalam 2 bentuk yaitu dengan bentuk *top down* dan *bottom up*. Pelaksanaan secara *top down* merupakan suatu

proses pelaksanaan kegiatan dimana semua alur baik dalam bentuk ide, bentuk kegiatan dan dana berasal pemerintah pusat, disini masyarakat hanya menerima apa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pelaksanaan secara *bottom up* merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan dimana masyarakat dituntut untuk memberikan ide dan masukan tentang kegiatan apa yang cocok dilaksanakan di daerah tempat mereka tinggal (Erwan A. Purwanto dan Dyah R. Sulistyastuti. 2012: 48).

PKBM merupakan suatu program yang bersifat *bottom up* karena PKBM suatu lembaga yang dibentuk, diselenggarakan, dikelola dan dikembangkan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat/komunitas. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat PAUD, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya proaktif menyikapi kebutuhan riil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Salah satu upaya yang ditempuh adalah membangun wadah kegiatan belajar masyarakat yang diberi nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang dibuat berdasarkan kebijakan pemberdayaan dalam bidang pendidikan.

b. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program

Berbagai indikator dalam implementasi program, baik terkait dengan implementor, sumberdaya, lingkungan, metode, permasalahan dan tingkat

kemajemukan yang dihadapi di masyarakat menjadi faktor yang berpengaruh dalam implementasi program. Sumberdaya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi tersebut. Dalam aktifitas implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan, program atau kebijakan.

Secara umum faktor-faktor yang memengaruhi implementasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut Riant Nugroho (2006:137-139) ada 4 (empat) indikator yang perlu dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan yaitu:

1. Apakah kebijakan itu sendiri sudah dinilai tepat, yakni bisa memecahkan masalah, dan apakah kebijakan itu telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah, serta apakah kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan karakter kebijakan.
2. Tepat pelaksanaannya, aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang menjadi pelaksanaannya, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.
3. Tepat target, ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.

4. Tepat lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan, yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait.

Mustopadidjaja (2003:37) menyatakan bahwa berhasil atau gagal suatu kebijakan tergantung pada beberapa kondisi yaitu a) ketetapan pelaksanaan kebijakan, b) konsisten dan keberlanjutan pelaksanaannya, c) terjadi tidaknya perkembangan diluar perkiraan.

Selain itu, Erwan A. Purwanto dan Dyah R. Sulistyastuti (2012: 86-87) dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Publik* mengemukakan 6 (enam) faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi (pelaksanaan) program yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri. Kualitas disini menyangkut banyak hal, seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai.

3. Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah dan lainnya). Ketepatan instrument ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hierarkis tentu akan menghambat proses implementasi.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan berpengaruh terhadap proses implementasi.
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang bwrkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

3. Aktor Implementasi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan berbagai pihak dapat berperan sebagai actor implementasi. Pemerintah atau negara bisa berperan sebagai actor utama dalam implementasi kebijakan. Namun peran implementasi kebijakan juga bisa diserahkan kepada public atau pasar melalui mekanisme *contracting out*, kerjasama, atau privatisasi. Semua tergantung pada kebutuhan pragmatis dari kebijakan itu sendiri (Riant Nugroho, 2006: 23).

Pada penelitian ini yang menjadi aktor dan terlibat langsung dalam Implementasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Pemberdayaan dan Peningkatan *Life Skills* Masyarakat di Nagari Sungai Jambu Kabupaten Tanah Datar yaitu Wali Nagari Sungai Jambu, Pengurus PKBM Marapi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa ketua koordinasi dan seksi bidang PKBM Marapi, tutor atau narasumber yang menjadi tenaga pendidik di PKBM Marapi, dan masyarakat yang menjadi anggota PKBM Marapi.

4. Kendala Dalam Implementasi Program

Pada setiap kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengalami adanya keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu sumber daya yang terbatas atau dapat disebut dengan kendala.

Menurut Hansen dalam Setia Budi (2005:27), jenis kendala implementasi program berdasarkan asalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kendala internal, merupakan faktor-faktor yang membatasi suatu instansi yang berasal dari dalam berupa kendala sumber daya. Dalam penelitian ini kendala berupa kurang profesionalnya kinerja tim pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.

- 2) Kendala eksternal, merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar instansi. Kendala dari luar dapat berupa pengaruh lingkungan tempat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.

Selain itu, menurut Hogwood dan Gunn dalam Erwan A. Purwanto dan Dyah R. Sulistyastuti (2012: 14-15), pada kenyataannya *perfect implementation* tidak pernah terwujud yang disebabkan karena beberapa kendala dalam implementasi program diantaranya:

1. Ada hambatan kondisi eksternal. Kegagalan implementasi bukan karena lemahnya kebijakan, namun bisa jadi karena faktor-faktor di luar organisasi yang menjadi penyebab utama kegagalan implementasi, misalnya karena pengaruh lingkungan, bencana alam, krisis moneter. Berbagai faktor eksternal tersebut menjadi sesuatu yang sangat sulit dikontrol oleh *para policy maker* maupun implementor kebijakan.
2. Waktu dan sumber daya tidak tersedia secara memadai. Persoalannya, sumberdaya bukan sesuatu yang berlimpah sehingga suatu kebijakan harus berkompetensi dengan kebijakan yang lain untuk mendapatkan kecukupan sumber daya tersebut.
3. Kebijakan tidak didasarkan pada landasan pemikiran (teoritis) yang kuat tentang hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kebijakan dan hasil yang ingin dicapai.
4. Hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasilnya jarang bersifat langsung. Seringkali terjadi suatu kebijakan akan menimbulkan dampak

(tercapainya tujuan yang ditetapkan) dalam waktu yang lama sehingga implementasi kebijakan tidak akan secara cepat dapat diketahui keberhasilannya.

5. Lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri. Mereka sangat tergantung pada aktor lain. Fakta yang ada menunjukkan bahwa prasyarat bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah adanya dukungan semua sumber daya yang dibutuhkan. Sehingga keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi bagaimana kemampuan implementor untuk melakukan konsolidasi berbagai sumber daya tersebut dengan cara melakukan *exchange* (pertukaran) yang bersifat legal.
6. Jarang ada kesepakatan yang bersifat umum diantara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Implementasi suatu kebijakan sangat jarang dilakukan oleh aktor atau lembaga tunggal (*single agency*). Akibatnya para implementor tersebut bisa jadi memiliki interpretasi yang berbeda-beda yang bisa
7. Jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Situasinya akan lebih sulit lagi ketika pra kondisi untuk terwujudnya komunikasi dan koordinasi tidak ada, misalnya persamaan persepsi tentang masalah yang dikomunikasikan, persamaan kepentingan, sarana komunikasi yang memadai, dll.

5. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Implementasi Program

Dalam implementasi program, tentunya dalam proses pelaksanaan menemui berbagai kendala dan permasalahan yang akan dihadapi oleh aktor implementasi yaitu oleh penanggung jawab program, pelaksana program dan kelompok sasaran program. Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada, dilakukanlah upaya dalam mengatasi kendala implementasi program tersebut.

Menurut Kartasasmita dalam Zubaedi (2013: 79), mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi kendala implementasi program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) fase, yaitu:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya, setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki.
- b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Artinya, langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya.
- c) Pemberdayaan mengandung pula arti melindungi masyarakat (*protecting*). Artinya, perlu diupayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah,

melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat harus melindungi masyarakat yang lemah, agar yang lemah jangan tertindas oleh orang yang kuat. Oleh sebab itu pemihakan/perlindungan terhadap yang lemah amat penting dalam proses implementasi program pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari mengemukakan bahwa strategi yang di gunakan dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat meliputi:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan berbagai sektor yang berfungsi memberdayakan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan dan mengutamakan peran aktif masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran wirausaha sebagai pelaku ekonomi dan menggerakkan roda perekonomian.

- 4) Mendorong pengusaha skala menengah dan besar untuk membantu wirausaha kecil atau ekonomi mikro dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil melalui berbagai pola yang sesuai.
- 5) Mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat lokal untuk mempercepat proses modernisasi di bidang ekonomi, teknologi, pelestarian budaya minang kabau dan budaya lain. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta solidaritas sosial masyarakat setempat.
- 6) Menumbuh kembangkan usaha-usaha masyarakat yang sudah ada agar mampu bersaing dalam era globalisasi saat ini. (Sumber : Pergub Sumbar Nomor 66 Tahun 2005)

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memandirikan masyarakat serta meningkatkan kesadaran untuk maju dan berkembang sehingga dapat terlibat dalam pembangunan , agar dapat bersaing dengan perkembangan masa.

7. Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan program kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Selaras dengan tujuan PKBM yaitu terwujudnya peningkatan mutu hidup

komunitas, dimana dimensi mutu kehidupan itu sangatlah luas, maka program PKBM terdiri dari lingkup atau bidang kegiatan yang mencakup semua dimensi kehidupan itu sendiri.

Program-program yang diselenggarakan di PKBM dapat sangat beragam dan dapat juga tak terbatas, namun harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di mana PKBM itu berada atau dikatakan yang relevan, serta program-program itu harus bermakna dan bermanfaat.

Berdasarkan Akta Notaris Pendirian PKBM Marapi No. 01 Tahun 2012, dalam BAB III Pasal 7 Lingkup Kegiatan PKBM Marapi dalam Bidang Kegiatan Usaha/Ekonomi Produktif mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas/pemberdayaan ekonomi anggota komunitas. Didalamnya mencakup semua program antara lain 1) unit usaha PKBM, 2) kelompok belajar usaha masyarakat, 3) pengembangan usaha warga masyarakat, 4) kerjasama dan jaringan usaha masyarakat, 5) upaya-upaya peningkatan produktivitas masyarakat, 6) penciptaan lapangan kerja baru dan sebagainya. Didalamnya juga meliputi seluruh aspek usaha mulai dari pembangunan usaha baru, perluasan pemasaran, pengembangan permodalan, peningkatan mutu, peningkatan kemampuan manajemen usaha, peningkatan kemampuan inovasi dan perancangan produk dan sebagainya.

8. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

PKBM adalah wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi masyarakat untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. PKBM dibentuk oleh masyarakat, milik masyarakat dan dikelola oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 1 dinyatakan bahwa “ Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 2, juga dijelaskan “ Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional”.

Pendidikan nonformal meliputi beberapa bentuk pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 3, “ Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan

pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”.

Pendidikan nonformal tidak dilaksanakan di sekolah. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 4 dinyatakan bahwa:

“ Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup (*life skills*), dan sikap untuk mengembangkan diri, mengemangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”.

Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 tentang standar dan prosedur penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dapat dijelaskan secara terperinci yaitu:

1) Pengertian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (*Community Based Institution*).

Terminologi PKBM dari masyarakat, berarti bahwa pendirian PKBM merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Keinginan itu datang dari suatu kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu kehidupan melalui suatu proses transformasional dan pembelajaran. Inisiatif ini dapat dihasilkan oleh suatu proses sosialisasi akan pentingnya PKBM sebagai wadah pemberdayaan masyarakat kepada beberapa anggota atau tokoh masyarakat setempat oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak lain di luar komunitas tersebut.

Oleh masyarakat, berarti bahwa penyelenggaraan, pengembangan, dan keberlanjutan PKBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Ini juga bermakna adanya semangat kebersamaan, kemandirian, dan kegotongroyongan dalam pengelolaan PKBM serta penyelenggaraan berbagai program pendidikan masyarakat pada lembaga tersebut. Untuk masyarakat, berarti bahwa keberadaan PKBM sepenuhnya untuk kemajuan dan keberdayaan kehidupan masyarakat tempat lembaga tersebut berada. Eksistensi lembaga didasarkan pada pemilihan program-program yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan atau pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan anggota masyarakat di luar komunitas tersebut ikut serta dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM. Masyarakat bertindak sekaligus sebagai subjek dan objek dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM.

Menurut UNESCO, PKBM merupakan salah satu wadah dalam memberikan kesempatan yang penuh kepada seluruh komponen masyarakat agar mampu memberdayakan masyarakat agar mandiri dan berdaya, mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mampu melakukan pengembangan dan pembangunan masyarakat, sehingga bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PKBM merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

2) Karakteristik PKBM

Karakteristik PKBM menunjukkan nilai-nilai yang harus selalu menjiwai seluruh kegiatan PKBM. Untuk membangun PKBM yang baik maka karakter harus terus dibentuk dan diperkuat PKBM. Tanpa memiliki karakter, PKBM akan sulit bertahan dan berkembang dalam mencapai tujuannya. Ada 9 karakter yang harus dimiliki dan dikembangkan di PKBM yaitu:

1. Kepedulian terhadap masyarakat marginal yang serba kekurangan;
2. Kemandirian penyelenggaraan;

3. Kebersamaan dalam kemajuan;
4. Kebermaknaan setiap program dan kegiatan;
5. Kemitraan dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi;
6. Fleksibilitas penyelenggaraan program;
7. Profesionalisme pengelolaan lembaga;
8. Transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban program dan lembaga;
9. Pembaharuan terus-menerus (continuous improvement).

3) Fungsi PKBM

PKBM sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk dan diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, secara kelembagaan mempunyai fungsi yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. Sebagai tempat kegiatan belajar bagi warga masyarakat, artinya tempat bagi warga masyarakat untuk menimba ilmu dan memperoleh berbagai jenis keterampilan dan pengetahuan fungsional yang dapat didayagunakan secara tepat dalam upaya memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
2. Sebagai tempat pusaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat, artinya bahwa PKBM diharapkan dapat digunakan sebagai tempat pertukaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di

masyarakat, sehingga menjadi suatu sinergi yang dinamis dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

3. Sebagai pusat dan sumber informasi, artinya bahwa PKBM merupakan tempat warga masyarakat untuk menanyakan berbagai informasi tentang berbagai jenis kegiatan pembelajaran dan keterampilan fungsional yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. PKBM dapat menyediakan informasi kepada anggota masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional untuk bekal hidup (*life skills*).
4. Sebagai ajang tukar menukar keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dengan prinsip saling membelajarkan melalui diskusi-diskusi.
5. Sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, serta nilai-nilai tertentu bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu dapat juga digunakan untuk berbagai pertemuan bagi penyelenggaraan dan narasumber baik intern maupun ekstern.
6. Sebagai lokal belajar yang tidak pernah berhenti, artinya PKBM merupakan suatu tempat yang secara terus menerus digunakan untuk proses belajar mengajar.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwasanya fungsi dari PKBM dalam masyarakat sebagai proses kegiatan belajar yang bersifat non-formal untuk

memudahkan masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup.

4) Parameter PKBM

Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 tentang standar dan prosedur penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), keberhasilan atau kegagalan PKBM dapat dilihat dari indikator parameter PKBM, diantaranya:

1. Partisipasi masyarakat (*Community participation*)

Salah satu ukuran kemajuan suatu PKBM adalah kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pendirian, penyelenggaraan, dan pengembangan PKBM. Semakin tinggi jumlah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam suatu PKBM maka semakin tinggi pula capaian keberhasilan dan kemajuan PKBM tersebut. Demikian juga, semakin tinggi mutu keterlibatan masyarakat setempat dalam suatu PKBM menggambarkan semakin tinggi kemajuan suatu PKBM. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu PKBM, akan terlihat dalam setiap proses manajemen yang ada baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian maupun dalam berbagai kegiatan dan permasalahan yang ada di PKBM tersebut. Partisipasi masyarakat juga dapat ditunjukkan dalam

dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana, dana, tenaga personalia, ide/ gagasan, dan sebagainya.

2. Manfaat bagi masyarakat (*Impact*)

Parameter berikutnya untuk mengukur tingkat kemajuan suatu PKBM adalah manfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan manfaat (*impact*) adalah seberapa besar PKBM tersebut telah memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu kehidupan komunitas tersebut. Sumbangan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan anggota masyarakat, peningkatan keterampilan, perbaikan perilaku, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penciptaan keharmonisan dan lain-lain.

3. Mutu dan relevansi program

Mutu dan relevansi program yang diselenggarakan oleh PKBM merupakan parameter berikutnya bagi kemajuan suatu PKBM. Untuk menilai mutu dan relevansi program yang diselenggarakan, perlu memperhatikan input, proses, dan output dalam pelaksanaan program. Untuk mengukur mutu dan relevansi program pembelajaran yang diselenggarakan telah banyak dikembangkan model-model pengukuran dan evaluasi pendidikan serta evaluasi mutu pengelolaan lembaga secara umum, misalnya Manajemen Mutu Total (Total Quality Management atau TQM), seri International Standard Organization (ISO) dan lain-lain.

4. Kemandirian dan Keberlanjutan lembaga (*Sustainability*)

Kemandirian dalam batasan ini adalah kemampuan PKBM untuk tetap berjalan dengan baik melaksanakan berbagai program tanpa harus bergantung kepada berbagai pihak lain di luar dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan keberlanjutan lembaga di sini adalah kemampuan PKBM untuk tetap bertahan terus-menerus melaksanakan seluruh program sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan lembaga perlu dikembangkan sistem pendanaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan lembaga dalam melakukan inovasi program, membangun sistem manajemen yang baik, melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melakukan sistem kaderisasi kepemimpinan yang baik.

9. Pemberdayaan Masyarakat

1) Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada dasarnya memberikan kekuatan (daya) kepada masyarakat untuk mampu memiliki kemandirian dan partisipasi dalam menjalani hidup dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, pemberdayaan dilakukan agar masyarakat mampu berpartisipasi untuk mencapai kemandirian.

Pemberdayaan Sugono (415: 2008) berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau

mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya dan mempunyai kekuatan.

Menurut Jim Ife dalam Zubaedi (2013: 75) pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan nya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.

World Bank dalam Zubaedi (2013: 75) mengartikan pemberdayaan sebagai perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan mempengaruhi, mengontrol dan mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Menurut Prijono, Onny, S dalam Zubaedi (2013: 75) proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan;

“Pertama, proses pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kedua, kecenderungan pemberdayaan yang dipengaruhi oleh konsientisasi yang merupakan suatu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran terhadap situasi yang sedang terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi dan sosial”.

Menurut Zubaedi (2013: 75) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan

sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tiga-p (pendampingan, penyuluhan dan pelayanan).

Sementara itu, Shardlow dalam Rukminto (2012:206) pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memberikan daya, kekuatan dan kesempatan pada individu atau masyarakat lemah melalui pendampingan, penyuluhan dan pelayanan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memberi atau meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok atau masyarakat dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya.

2) Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan orang berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Hal itu berarti memberi mereka kesempatan menunjukkan bahwa mereka

dapat memberikan gagasan baik dan bahwa mereka mempunyai keterampilan menempatkan gagasan dalam praktik.

Fredian Tonny Nasdian (2014: 96), tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk:

“Menumbuhkan peranserta dan kemandirian sehingga masyarakat baik di tingkat individu, kelompok, kelembagaan, maupun komunitas memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, memiliki akses sumberdaya, memiliki kesadaran kritis, mampu melakukan pengorganisasian dan kontrol sosial dari segala aktivitas pembangunan yang dilakukan di lingkungannya”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membantu, meningkatkan kemampuan dan memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat itu lebih mandiri dan dapat ikut serta dalam pembangunan nantinya.

3) Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.

Menurut Latama, Gunarto dalam Zubaedi (2013: 76) pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Meminjam definisi *Asian Development Bank* (ADB), kegiatan pembangunan

termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap komprehensif jika menampilkan lima indikator (karakteristik) yaitu:

a) Berbasis lokal;

Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal jika perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal dan hasilnya pun dinikmati masyarakat lokal.

b) Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan;

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan apabila ia dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

c) Berbasis kemitraan;

Kemitraan akan membuka akses orang miskin terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas.

d) Secara holistik;

Pemberdayaan masyarakat bersifat holistic berarti ia mencakup segala aspek. Untuk itu setiap sumber daya lokal patut diketahui dan didayagunakan agar masyarakat terhindar dari sikap ketergantungan kepada segala sesuatu.

e) Berkelanjutan;

Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan jika programnya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi maupun segi sosial.

Menurut Ife (2002: 22), ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan. Bila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsekuen akan menjadikan program pemberdayaan sebagai pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat.

10. Peningkatan *Life Skills* Masyarakat

1) Pengertian *Life Skills*

Istilah kecakapan hidup (*life skills*) diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga Teknis, 2003).

Menurut World Health Organization (WHO) dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup. 2011 memberikan pengertian bahwa kecakapan hidup (*life skills*) adalah keterampilan/ kemampuan

untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidup sehari-hari secara efektif.

WHO mengelompokkan kecakapan hidup (*life skills*) ke dalam lima indikator, yaitu (1) kecakapan mengenal diri (*self awarness*) atau kecakapan pribadi (*personal skills*), (2) kecakapan sosial (*social skills*), (3) kecakapan berfikir (*thinking skills*), (4) kecakapan akademik (*akademik skills*), (5) kecakapan kejuruan (*vocational skills*).

Sementara itu Tim *Broad Base Education* (2002) menafsirkan kecakapan hidup (*life skills*) sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Slamet PH, <http://www.infodiknas.com/pendidikan-kecakapan-hidup-konsep-dasar-2.html/> Juli, 16. 2009).

Pendidikan Kecakapan Hidup (*life skills*) lebih luas dari sekedar keterampilan bekerja, apalagi sekedar keterampilan manual. Pendidikan kecakapan hidup merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga belajar agar memiliki keberanian dan kemauan

menghadapi masalah hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya.

Menurut Jecques Delor dalam Anwar (2012:5) mengatakan bahwa pada dasarnya program *life skills* ini berpegang pada empat pilar pembelajaran yaitu sebagai berikut:

- a. *Learning to know* (belajar untuk memperoleh pengetahuan)
- b. *Learning to do* (belajar untuk dapat berbuat/bekerja)
- c. *Learning to be* (belajar untuk menjadi orang yang berguna)
- d. *Learning to live together* (belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa pendidikan kecakapan hidup (*Life skills*) pada dasarnya merupakan suatu upaya pendidikan untuk meningkatkan kecakapan seseorang untuk melaksanakan hidup dan kehidupannya secara tepat guna dan berdaya guna dalam kehidupan sehari-hari serta mampu mengembangkan kemampuan belajar, menghilangkan kebiasaan dan pola pikir yang tidak tepat, menyadari dan mensyukuri potensi diri untuk mengembangkan problema kehidupan dan memecahkannya secara kreatif.

2) Ciri-Ciri Pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup

Ada beberapa ciri-ciri dari pembelajaran pendidikan kecakapan hidup yang relevan sebagaimana diungkapkan oleh Depdiknas (2002):

- a. Terjadi proses identifikasi kebutuhan belajar;
- b. Terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama;
- c. Terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, belajar usaha mandiri dan usaha bersama;
- d. Terjadi proses penguasaan kecakapan personal, sosial, vokasional, akademik, manajerial serta kewirausahaan;
- e. Terjadi proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan dengan benar, hingga menghasilkan produk bermutu;
- f. Terjadi proses interaksi saling belajar dari para ahli;
- g. Terjadi proses penilaian kompetensi;
- h. Terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha bersama.

Apabila dihubungkan dengan pekerjaan tertentu, *life skills* dalam lingkup pendidikan nonformal ditujukan pada penguasaan *vokasional skills* yang intinya terletak pada penguasaan keterampilan secara khusus (spesifik). Apabila dipahami dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa *life skills* dalam konteks kepemilikan keterampilan secara khusus sesungguhnya diperlukan oleh setiap orang. Ini

berarti bahwa program *life skills* dalam pemaknaan program pendidikan nonformal diharapkan dapat menolong mereka untuk memiliki harga diri mencari nafkah dalam konteks peluang yang ada di lingkungannya.

3) Prinsip Umum Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

Pendidikan *life skills* adalah pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan berguna bagi perkembangan kehidupan peserta didik. Dengan demikian pendidikan *life skills* harus dapat merefleksikan kehidupan nyata dalam proses pengajaran agar peserta didik memperoleh kecakapan hidup tersebut, sehingga peserta didik siap untuk hidup di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan pendidikan *life skill* adalah bervariasi , disesuaikan dengan kondisi lingkungan, namun memiliki prinsip-prinsip umum yang sama. Berikut ini adalah prinsip umum pendidikan life skill, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia, yaitu : (1) Tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku, (2) Tidak harus dengan mengubah kurikulum, tetapi yang diperlukan adalah penyiasaan kurikulum untuk diorientasikan dan diintegrasikan kepada pengembangan kecakapan hidup, (3) Etika-sosio-religius bangsa dapat diintegrasikan dalam proses pendidikan, (4) Pembelajaran menggunakan prinsip *learning to know, learning to do, learning to be*, dan *learning to live together*, (5) Pelaksanaan pendidikan *life skills* dengan

menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS), (6) Potensi wilayah sekitar sekolah dapat direfleksikan dalam penyelenggaraan pendidikan, sesuai dengan prinsip pendidikan kontekstual dan pendidikan berbasis luas (*broad base education*), (7) Paradigma *learning for life and school to work* dapat dijadikan dasar kegiatan pendidikan, sehingga terjadi pertautan antara pendidikan dengan kehidupan nyata peserta didik, (8) Penyelenggaraan pendidikan harus selalu diarahkan agar peserta didik menuju hidup yang sehat, dan berkualitas, mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas serta memiliki akses untuk mampu memenuhi hidupnya secara layak (Depdiknas. 2002).

4) Tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) sebagai salah satu program dari pendidikan nonformal memiliki peran yang penting dalam rangka membekali warga belajar agar dapat hidup secara mandiri. Secara umum, tujuan utama pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa datang.

Secara khusus tujuan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) memberikan pelayanan pendidikan kecakapan hidup kepada warga belajar agar: (1) memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja baik bekerja mandiri (wirausaha) atau bekerja pada suatu perusahaan

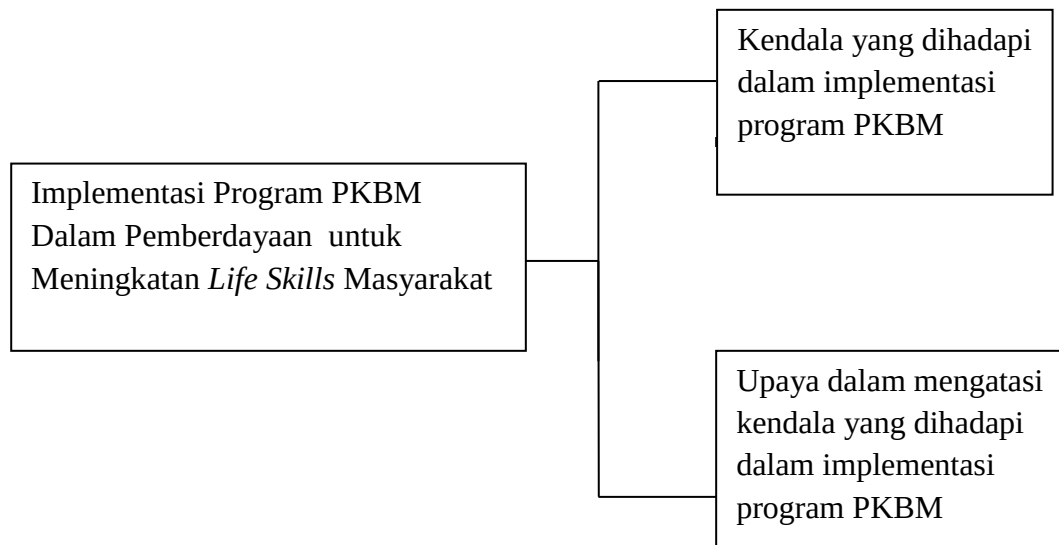
produksi/jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, (2) memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global, (3) memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri maupun anggota keluarganya, (4) mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat (*life long education*) dalam rangka mewujudkan keadilan di setiap lapisan masyarakat. (Slamet PH, <http://www.infodiknas.com/pendidikan-kecakapan-hidup-konsep-dasar-2.html/> Juli, 16. 2009).

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat implementasi program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam pemberdayaan dan peningkatan *life skills* masyarakat, kendala yang dihadapi dalam implementasi program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV sebelumnya, maka pada BAB V ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran dari Implementasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar.

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program PKBM Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar dimulai pada tahun 2012 dengan bantuan dana sebesar Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan melihat potensi yang dimiliki masyarakat berupa hasil pertanian yang ada di Nagari Sungai Jambu, program PKBM dalam bidang kegiatan usaha ekonomi produktif dilaksanakan dengan mengolah hasil pertanian menjadi makanan lokal yang selanjutnya hasil usaha produk PKBM dipasarkan oleh anggota PKBM ke warung-warung yang ada disekitar Nagari Sungai Jambu, sehingga memberikan penghasilan tambahan bagi anggota PKBM untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Untuk implementasi program PKBM keberadaan PKBM sudah dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat diantaranya berupa peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan

peningkatan pendapatan anggota PKBM. Dengan hal tersebut, implementasi Program PKBM dalam bidang kegiatan usaha ekonomi produktif sudah berjalan dan terlaksana sampai ke sasarannya yaitu masyarakat sebagai anggota PKBM, sehingga memberikan manfaat dalam pemberdayaan dan peningkatan *life skills* masyarakat. Namun, disisi lain PKBM Marapi Nagari Sungai Jambu Kabupaten Tanah Datar menghadapi kendala dan tantangan masih kuatnya ketergantungan terhadap bantuan dan dukungan dana dari pemerintah melalui berbagai bantuan yang diberikan.

2. Kendala dalam implemetasi program PKBM berupa kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berupa kendala dalam hal modal dan bantuan dari pemerintah, kendala dalam tenaga pendidik (tutor), dan kendala eksternal berupa kendala partisipasi masyarakat dan kendala akses pasar.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi program PKBM yaitunya upaya dalam hal modal dan bantuan pemerintah yaitu mengajukan usulan (proposal) kepada pemerintah dan dinas terkait untuk mendapatkan dana berupa modal dan bantuan, selain itu wali nagari sebagai aparat pemerintahan nagari akan memasukkan sumber pendanaan PKBM melalui APB Nagari, upaya dalam tenaga pendidik (tutor) adalah mengajukan usulan (proposal) kepada pemerintah, dinas terkait dan kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kota Padang Panjang untuk mendatangkan tenaga pendidik (tutor), upaya partisipasi masyarakat yang dilakukan adalah melakukan teguran, pendekatan dan pengertian langsung kepada masyarakat

tentang pentingnya mengikuti kegiatan di PKBM, upaya akses pasar yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Dinas Koperindagpastam dan beberapa UMKM dan toko pusat (sentral) oleh-oleh yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

B. Saran

Menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk peningkatan Implementasi Program PKBM Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sungai Jambu Tanah Datar, yaitunya sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintahan Nagari Sungai Jambu Kabupaten Tanah Datar selaku penanggung jawab program, saran yang dapat diberikan yaitu untuk lebih memberikan perhatian baik berupa moril ataupun materil kepada PKBM Marapi agar dalam pelaksanaan (implementasi) program PKBM dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar bagi masyarakat.
2. Kepada pengurus PKBM sebagai pengelola PKBM Marapi program PKBM hendaknya disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sebaik-baiknya, dalam sosialisasi hendaknya dijelaskan beberapa kekurangan dan kebaikan pengembangan dan pelaksanaan program PKBM secara terbuka dan demokratis.
3. Kepada pihak lain yang ikut mengelola PKBM (tenaga pendidik (tutor), ketua koordinasi bidang PKBM, LPM Nagari, tokoh adat dan tokoh agama)

hendaknya memberikan tanggung jawab penuh dan melibatkan diri dalam pelaksanaan program PKBM.

4. Membina masyarakat sebagai anggota PKBM yang telah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk bekal hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Isbandi Rukminto. 2012. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anwar. 2004. *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education)*. Bandung: Alfabeta
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Fredian Tonny Nasdian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Lexy. J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia
- Lexy. J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
- Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Riant Nugroho Dwijowijoto. 2003. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta
- Solichin Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Syahrin Naihasy. 2006. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Mida Pustaka
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

SUMBER PERATURAN

Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

SUMBER LAIN

Akta Notaris Pendirian PKBM No. 01 Tahun 2012

Depdiknas. 2002. *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skills) Melalui Pendekatan Broad-Based Education*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Kemendiknas. 2011. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUD, Nonformal dan Informal

Standar dan Prosedur Penyelenggaraan PKBM. 2012. Direktorat Pembinaan Masyarakat Direktorat PAUD, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SUMBER INTERNET

Setia Budi. 2005. *Persepsi Anggota tentang Peran Pemimpin Kelompok pada Masyarakat Miskin Kota di Kecamatan Bogor Timur*. Kota Bogor. Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (<http://www.damandi.co.id>), diakses 03 Mei 2010

<http://pkbm-indonesia.com/pkbm>

(Slamet PH, <http://www.infodiknas.com/pendidikan-kecakapan-hidup-konsep-dasar-2.html/> Juli, 16. 2009).